



Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020: Mewujudkan Akuntabilitas dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta, 22 September 2020 – Sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 melalui tayangan video *conference*. Sejalan dengan isu yang relevan saat ini, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 mengusung tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Saat ini, Indonesia dan seluruh negara di dunia sedang menghadapi tantangan besar untuk memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). “Program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi adalah program yang luar biasa penting, didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa. *Emergency* atau *urgency* menjadi sangat penting. Bapak Presiden menekankan kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting namun pada saat yang sama ditekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengompromikan akuntabilitas transparansi dan pengelolaan yang baik,” ujar Menkeu.

Dalam situasi darurat khususnya terkait dengan pandemi Covid-19, terdapat banyak transaksi Pemerintah yang pelaksanaannya memerlukan penanganan sangat cepat, mendesak, dan masif. Hal ini tentunya harus diikuti penguatan tata kelola yang baik. Prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi mutlak tetap harus dijaga, sehingga setiap transaksi keuangan negara dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, capaian opini atau kualitas laporan keuangan dapat dipertahankan dan terus dapat ditingkatkan.

Melalui kegiatan ini Pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik. “Saya sangat menghargai, dengan makin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian. Saya juga berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah,” ungkap Menkeu.

Selain itu, Menteri Keuangan juga mengapresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga atas kinerja dalam mengelola BMN. “Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga atas kinerja terbaiknya di dalam mengelola barang milik negara ini. Kita Kementerian/Lembaga Negara akan diharapkan terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan barang milik negara,” jelas Menkeu.

Menkeu juga menambahkan penatausahaan BMN merupakan sikap yang tidak terpisahkan dari rasa mengelola keuangan negara. “Dengan kondisi saat ini, peran nyata Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah adalah sangat penting dan kita harus mengupayakan agar BMN tidak menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat. Dalam kondisi penanganan Covid saat ini kita melihat banyak Barang Milik Negara yang bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang isolasi atau bahkan fasilitas observasi dan perawatan seperti yang dilakukan di Pulau Galang, Wisma Atlet dan Asrama Haji Pondok Gede,” terang Menkeu.

Kegiatan Rakernas juga diisi dengan *talkshow* yang menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Pemerintah Daerah. *Talkshow* tersebut diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus memotivasi para peserta khususnya pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan Kepala Daerah untuk senantiasa mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di masa darurat penanganan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.

Selain *talkshow*, sebagai rangkaian kegiatan Rakernas juga diadakan sesi webinar dan *coaching clinic* secara daring. Webinar yang mengangkat tema “Generasi Keren Peduli APBN” dan menghadirkan ekonom muda, akademisi muda, serta aktivis Kemenkeu Muda ini akan memperkenalkan dan menanamkan kesadaran bagi kaum milenial akan pentingnya pengelolaan keuangan negara, sehingga generasi muda siap mengawal APBN dan menjadi agen penerus pencapaian cita-cita bangsa.


Sedangkan untuk sesi *coaching clinic*, disediakan beberapa *meeting room* dengan tema yang berbeda dan berjalan secara paralel, meliputi layanan konsultasi bidang: (i) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan narasumber dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) Akuntansi BMN/BMD dengan narasumber dari Ditjen Kekayaan Negara, serta (iii) Perimbangan Keuangan dengan narasumber dari Ditjen Perimbangan Keuangan.


Melalui rangkaian kegiatan Rakernas ini diharapkan dapat dicapai sebuah komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan seluruh entitas Pemerintah dapat tetap terjaga, terus memperoleh opini WTP, dan berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.


Narahubung Media:


Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

☎ 021 3846663
✉ mediacenter@kemenkeu.go.id

 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

 [Kemenkeu](#)

 [@kemenkeuRI](#)

 [Kemenkeu RI](#)

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN 10X WTP BERTURUT-TURUT

No.	Daftar Kementerian / Lembaga /Pemerintah Daerah
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	Dewan Perwakilan Rakyat
3.	Badan Pemeriksa Keuangan
4.	Kementerian Sekretariat Negara
5.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6.	Kementerian Perindustrian
7.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
8.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
9.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
10.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
11.	Badan Intelijen Negara
12.	Dewan Ketahanan Nasional
13.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
14.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
15.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
16.	Badan Narkotika Nasional
17.	Mahkamah Konstitusi
18.	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
19.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
20.	Lembaga Administrasi Negara
21.	Badan Kepegawaian Negara
22.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
23.	Kementerian Perdagangan
24.	Dewan Perwakilan Daerah
25.	Komisi Yudisial
26.	Prov Kepulauan Riau
27.	Prov Daerah Istimewa Yogyakarta
28.	Prov Sulawesi Selatan
29.	Kota Banda Aceh
30.	Kota Palembang
31.	Kota Bandar Lampung
32.	Kota Metro
33.	Kota Surakarta

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN 10X WTP BERTURUT-TURUT

No.	Daftar Kementerian / Lembaga /Pemerintah Daerah
34.	Kota Yogyakarta
35.	Kota Blitar
36.	Kota Tangerang
37.	Kab Nagan Raya
38.	Kab Lampung Barat
39.	Kab Way Kanan
40.	Kab Jepara
41.	Kab Tangerang

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN 5X WTP BERTURUT-TURUT

No.	Daftar Kementerian / Lembaga /Pemerintah Daerah
1.	Mahkamah Agung
2.	Kementerian Dalam Negeri
3.	Kementerian Keuangan
4.	Kementerian Perhubungan
5.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Kementerian Kesehatan
7.	Kementerian Pariwisata
8.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
9.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
11.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
12.	Lembaga Ketahanan Nasional
13.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
14.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
15.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
16.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
17.	Arsip Nasional Republik Indonesia
18.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
19.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
20.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
21.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
22.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
23.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
24.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
25.	Sekretariat Kabinet
26.	Badan Pengawas Pemilihan Umum
27.	Prov Aceh
28.	Prov Sumatera Utara
29.	Prov Sumatera Barat
30.	Prov Riau
31.	Prov Jambi
32.	Prov Sumatera Selatan

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN 5X WTP BERTURUT-TURUT

No.	Daftar Kementerian / Lembaga /Pemerintah Daerah
33.	Prov Lampung
34.	Prov Jawa Barat
35.	Prov Jawa Tengah
36.	Prov Jawa Timur
37.	Prov Bali
38.	Prov Nusa Tenggara Barat
39.	Prov Nusa Tenggara Timur
40.	Prov Kalimantan Tengah
41.	Prov Kalimantan Selatan
42.	Prov Kalimantan Timur
43.	Prov Kalimantan Utara
44.	Prov Sulawesi Utara
45.	Prov Sulawesi Tengah
46.	Prov Sulawesi Tenggara
47.	Prov Gorontalo
48.	Prov Sulawesi Barat
49.	Prov Papua
50.	Prov Papua Barat
51.	Kota Langsa
52.	Kota Sabang
53.	Kota Bukittinggi
54.	Kota Padang
55.	Kota Pariaman
56.	Kota Payakumbuh
57.	Kota Sawahlunto
58.	Kota Sungai Penuh
59.	Kota Lubuk Linggau
60.	Kota Pagar Alam
61.	Kota Prabumulih
62.	Kota Batam
63.	Kota Tanjung Pinang
64.	Kota Banjar
65.	Kota Bekasi
66.	Kota Cimahi
67.	Kota Depok

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN 5X WTP BERTURUT-TURUT

No.	Daftar Kementerian / Lembaga /Pemerintah Daerah
68.	Kota Sukabumi
69.	Kota Pekalongan
70.	Kota Batu
71.	Kota Kediri
72.	Kota Malang
73.	Kota Mojokerto
74.	Kota Surabaya
75.	Kota Cilegon
76.	Kota Tangerang Selatan
77.	Kota Denpasar
78.	Kota Bima
79.	Kota Mataram
80.	Kota Pontianak
81.	Kota Banjarbaru
82.	Kota Banjarmasin
83.	Kota Balikpapan
84.	Kota Bontang
85.	Kota Samarinda
86.	Kota Bitung
87.	Kota Kotamobagu
88.	Kota Tomohon
89.	Kota Palu
90.	Kota Makassar
91.	Kota Palopo
92.	Kota Baubau
93.	Kota Kendari
94.	Kota Gorontalo
95.	Kota Ternate
96.	Kota Tidore Kepulauan
97.	Kota Jayapura
98.	Kab Aceh Barat
99.	Kab Aceh Barat Daya
100.	Kab Aceh Besar
101.	Kab Aceh Jaya
102.	Kab Aceh Selatan

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN 5X WTP BERTURUT-TURUT

No.	Daftar Kementerian / Lembaga /Pemerintah Daerah
103.	Kab Aceh Tamiang
104.	Kab Aceh Tengah
105.	Kab Aceh Timur
106.	Kab Aceh Utara
107.	Kab Bener Meriah
108.	Kab Bireuen
109.	Kab Gayo Lues
110.	Kab Pidie
111.	Kab Pidie Jaya
112.	Kab Simeuleu
113.	Kab Dairi
114.	Kab Labuhanbatu Selatan
115.	Kab Tapanuli Selatan
116.	Kab Tapanuli Utara
117.	Kab Agam
118.	Kab Dharmasraya
119.	Kab Lima Puluh Kota
120.	Kab Pasaman
121.	Kab Pesisir Selatan
122.	Kab Tanah Datar
123.	Kab Bengkalis
124.	Kab Kepulauan Meranti
125.	Kab Kuantan Singingi
126.	Kab Pelalawan
127.	Kab Siak
128.	Kab Batang Hari
129.	Kab Kerinci
130.	Kab Tebo
131.	Kab Banyuasin
132.	Kab Lahat
133.	Kab Muara Enim
134.	Kab Musi Banyuasin
135.	Kab Ogan Komering Ilir
136.	Kab Ogan Komering Ulu
137.	Kab Ogan Komering Ulu Selatan

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN 5X WTP BERTURUT-TURUT

No.	Daftar Kementerian / Lembaga /Pemerintah Daerah
138.	Kab Ogan Komering Ulu Timur
139.	Kab Pringsewu
140.	Kab Tulang Bawang
141.	Kab Tulang Bawang Barat
142.	Kab Bintan
143.	Kab Karimun
144.	Kab Bekasi
145.	Kab Bogor
146.	Kab Ciamis
147.	Kab Cirebon
148.	Kab Garut
149.	Kab Indramayu
150.	Kab Karawang
151.	Kab Kuningan
152.	Kab Majalengka
153.	Kab Purwakarta
154.	Kab Sukabumi
155.	Kab Sumedang
156.	Kab Banjarnegara
157.	Kab Banyumas
158.	Kab Blora
159.	Kab Boyolali
160.	Kab Grobogan
161.	Kab Karanganyar
162.	Kab Kudus
163.	Kab Pati
164.	Kab Pekalongan
165.	Kab Purworejo
166.	Kab Semarang
167.	Kab Sragen
168.	Kab Sukoharjo
169.	Kab Temanggung
170.	Kab Wonogiri
171.	Kab Bantul
172.	Kab Gunung Kidul

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN 5X WTP BERTURUT-TURUT

No.	Daftar Kementerian / Lembaga /Pemerintah Daerah
173.	Kab Kulon Progo
174.	Kab Sleman
175.	Kab Banyuwangi
176.	Kab Bojonegoro
177.	Kab Bondowoso
178.	Kab Gresik
179.	Kab Jombang
180.	Kab Madiun
181.	Kab Magetan
182.	Kab Malang
183.	Kab Mojokerto
184.	Kab Ngawi
185.	Kab Pacitan
186.	Kab Pamekasan
187.	Kab Pasuruan
188.	Kab Ponorogo
189.	Kab Probolinggo
190.	Kab Sidoarjo
191.	Kab Tuban
192.	Kab Lebak
193.	Kab Serang
194.	Kab Badung
195.	Kab Buleleng
196.	Kab Gianyar
197.	Kab Jembrana
198.	Kab Karangasem
199.	Kab Klungkung
200.	Kab Tabanan
201.	Kab Bima
202.	Kab Dompu
203.	Kab Lombok Barat
204.	Kab Lombok Tengah
205.	Kab Lombok Utara
206.	Kab Sumbawa
207.	Kab Sumbawa Barat

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN 5X WTP BERTURUT-TURUT

No.	Daftar Kementerian / Lembaga /Pemerintah Daerah
208.	Kab Ketapang
209.	Kab Kubu Raya
210.	Kab Sanggau
211.	Kab Sekadau
212.	Kab Sintang
213.	Kab Barito Utara
214.	Kab Kotawaringin Barat
215.	Kab Kotawaringin Timur
216.	Kab Lamandau
217.	Kab Murung Raya
218.	Kab Pulang Pisau
219.	Kab Sukamara
220.	Kab Balangan
221.	Kab Banjar
222.	Kab Barito Kuala
223.	Kab Hulu Sungai Selatan
224.	Kab Hulu Sungai Utara
225.	Kab Kotabaru
226.	Kab Tabalong
227.	Kab Tanah Bumbu
228.	Kab Tanah Laut
229.	Kab Tapin
230.	Kab Kutai Barat
231.	Kab Kutai Timur
232.	Kab Paser
233.	Kab Malinau
234.	Kab Nunukan
235.	Kab Bolaang Mongondow Selatan
236.	Kab Bolaang Mongondow Timur
237.	Kab Kepulauan Sangihe
238.	Kab Kep. Siau Tagulandang Biaro
239.	Kab Minahasa
240.	Kab Minahasa Tenggara
241.	Kab Minahasa Utara
242.	Kab Banggai

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN 5X WTP BERTURUT-TURUT

No.	Daftar Kementerian / Lembaga /Pemerintah Daerah
243.	Kab Tojo Una Una
244.	Kab Bantaeng
245.	Kab Bone
246.	Kab Bulukumba
247.	Kab Gowa
248.	Kab Luwu
249.	Kab Luwu Timur
250.	Kab Luwu Utara
251.	Kab Maros
252.	Kab Pangkajene dan Kepulauan
253.	Kab Pinrang
254.	Kab Soppeng
255.	Kab Toraja Utara
256.	Kab Wajo
257.	Kab Bombana
258.	Kab Buton
259.	Kab Kolaka Utara
260.	Kab Konawe
261.	Kab Wakatobi
262.	Kab Bone Bolango
263.	Kab Gorontalo
264.	Kab Pohuwato
265.	Kab Majene
266.	Kab Mamasa
267.	Kab Pasangkayu (sbilmnya Kab Mamuju Utara)
268.	Kab Mamuju Tengah
269.	Kab Buru
270.	Kab Maluku Tengah
271.	Kab Maluku Tenggara
272.	Kab Halmahera Selatan
273.	Kab Asmat
274.	Kab Jayapura
275.	Kab Jayawijaya
276.	Kab Kepulauan Yapen
277.	Kab Merauke

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN **5X WTP** BERTURUT-TURUT

No.	Daftar Kementerian / Lembaga /Pemerintah Daerah
278.	Kab Mimika
279.	Kab Fakfak
280.	Kab Kaimana
281.	Kab Maybrat
282.	Kab Raja Ampat
283.	Kab Sorong
284.	Kab Sorong Selatan
285.	Kab Tambrau
286.	Kab Teluk Bintuni

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	Dewan Perwakilan Rakyat
3.	Badan Pemeriksa Keuangan
4.	Mahkamah Agung
5.	Kejaksaan Republik Indonesia
6.	Kementerian Sekretariat Negara
7.	Kementerian Dalam Negeri
8.	Kementerian Luar Negeri
9.	Kementerian Pertahanan
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11.	Kementerian Keuangan
12.	Kementerian Pertanian
13.	Kementerian Perindustrian
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15.	Kementerian Perhubungan
16.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17.	Kementerian Kesehatan
18.	Kementerian Agama
19.	Kementerian Ketenagakerjaan
20.	Kementerian Sosial
21.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
23.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27.	Kementerian Pariwisata
28.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/BRIN
30.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
33.	Badan Intelijen Negara

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
34.	Dewan Ketahanan Nasional
35.	Badan Pusat Statistik
36.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
37.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
38.	Perpustakaan Nasional
39.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
40.	Kepolisian Negara Republik Indonesia
41.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
42.	Lembaga Ketahanan Nasional
43.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
44.	Badan Narkotika Nasional
45.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
46.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
47.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
48.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
49.	Mahkamah Konstitusi
50.	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
51.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
52.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
53.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
54.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
55.	Badan Informasi Geospasial
56.	Badan Standardisasi Nasional
57.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
58.	Lembaga Administrasi Negara
59.	Arsip Nasional Republik Indonesia
60.	Badan Kepegawaian Negara
61.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
62.	Kementerian Perdagangan
63.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
64.	Komisi Pemberantasan Korupsi
65.	Dewan Perwakilan Daerah
66.	Komisi Yudisial
67.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
68.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
69.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
70.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
71.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
72.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
73.	Ombudsman Republik Indonesia
74.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
75.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
76.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
77.	Sekretariat Kabinet
78.	Badan Pengawas Pemilihan Umum
79.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
80.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
81.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
82.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
83.	Badan Ekonomi Kreatif
84.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
85.	Bendahara Umum Negara
86.	Prov Aceh
87.	Prov Sumatera Utara
88.	Prov Sumatera Barat
89.	Prov Riau
90.	Prov Jambi
91.	Prov Sumatera Selatan
92.	Prov Bengkulu
93.	Prov Lampung
94.	Prov Bangka Belitung
95.	Prov Kepulauan Riau
96.	Prov DKI Jakarta
97.	Prov Jawa Barat
98.	Prov Jawa Tengah
99.	Prov Daerah Istimewa Yogyakarta
100.	Prov Jawa Timur
101.	Prov Banten
102.	Prov Bali

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
103.	Prov Nusa Tenggara Barat
104.	Prov Nusa Tenggara Timur
105.	Prov Kalimantan Barat
106.	Prov Kalimantan Tengah
107.	Prov Kalimantan Selatan
108.	Prov Kalimantan Timur
109.	Prov Kalimantan Utara
110.	Prov Sulawesi Utara
111.	Prov Sulawesi Tengah
112.	Prov Sulawesi Selatan
113.	Prov Sulawesi Tenggara
114.	Prov Gorontalo
115.	Prov Sulawesi Barat
116.	Prov Maluku
117.	Prov Maluku Utara
118.	Prov Papua
119.	Prov Papua Barat
120.	Kota Banda Aceh
121.	Kota Langsa
122.	Kota Lhokseumawe
123.	Kota Sabang
124.	Kota Binjai
125.	Kota Gunung Sitoli
126.	Kota Sibolga
127.	Kota Tebing Tinggi
128.	Kota Bukittinggi
129.	Kota Padang
130.	Kota Padang Panjang
131.	Kota Pariaman
132.	Kota Payakumbuh
133.	Kota Sawahlunto
134.	Kota Solok
135.	Kota Dumai
136.	Kota Pekanbaru
137.	Kota Jambi

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
138.	Kota Sungai Penuh
139.	Kota Lubuk Linggau
140.	Kota Pagar Alam
141.	Kota Palembang
142.	Kota Prabumulih
143.	Kota Bengkulu
144.	Kota Bandar Lampung
145.	Kota Metro
146.	Kota Pangkal Pinang
147.	Kota Batam
148.	Kota Tanjung Pinang
149.	Kota Bandung
150.	Kota Banjar
151.	Kota Bekasi
152.	Kota Bogor
153.	Kota Cimahi
154.	Kota Cirebon
155.	Kota Depok
156.	Kota Sukabumi
157.	Kota Tasikmalaya
158.	Kota Magelang
159.	Kota Pekalongan
160.	Kota Salatiga
161.	Kota Semarang
162.	Kota Surakarta
163.	Kota Tegal
164.	Kota Yogyakarta
165.	Kota Batu
166.	Kota Blitar
167.	Kota Kediri
168.	Kota Madiun
169.	Kota Malang
170.	Kota Mojokerto
171.	Kota Probolinggo
172.	Kota Surabaya

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
173.	Kota Cilegon
174.	Kota Serang
175.	Kota Tangerang
176.	Kota Tangerang Selatan
177.	Kota Denpasar
178.	Kota Bima
179.	Kota Mataram
180.	Kota Kupang
181.	Kota Pontianak
182.	Kota Singkawang
183.	Kota Palangkaraya
184.	Kota Banjarbaru
185.	Kota Banjarmasin
186.	Kota Balikpapan
187.	Kota Bontang
188.	Kota Samarinda
189.	Kota Tarakan
190.	Kota Bitung
191.	Kota Kotamobagu
192.	Kota Manado
193.	Kota Tomohon
194.	Kota Palu
195.	Kota Makassar
196.	Kota Palopo
197.	Kota Parepare
198.	Kota Baubau
199.	Kota Kendari
200.	Kota Gorontalo
201.	Kota Ambon
202.	Kota Tual
203.	Kota Ternate
204.	Kota Tidore Kepulauan
205.	Kota Jayapura
206.	Kota Sorong
207.	Kab Aceh Barat

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
208.	Kab Aceh Barat Daya
209.	Kab Aceh Besar
210.	Kab Aceh Jaya
211.	Kab Aceh Selatan
212.	Kab Aceh Singkil
213.	Kab Aceh Tamiang
214.	Kab Aceh Tengah
215.	Kab Aceh Tenggara
216.	Kab Aceh Timur
217.	Kab Aceh Utara
218.	Kab Bener Meriah
219.	Kab Bireuen
220.	Kab Gayo Lues
221.	Kab Nagan Raya
222.	Kab Pidie
223.	Kab Pidie Jaya
224.	Kab Simeuleu
225.	Kab Asahan
226.	Kab Batubara
227.	Kab Dairi
228.	Kab Deli Serdang
229.	Kab Humbang Hasundutan
230.	Kab Karo
231.	Kab Labuhanbatu Selatan
232.	Kab Labuhanbatu Utara
233.	Kab Langkat
234.	Kab Padang Lawas
235.	Kab Padang Lawas Utara
236.	Kab Samosir
237.	Kab Serdang Bedagai
238.	Kab Tapanuli Selatan
239.	Kab Tapanuli Utara
240.	Kab Toba Samosir
241.	Kab Agam
242.	Kab Dharmasraya
243.	Kab Kep. Mentawai
244.	Kab Lima Puluh Kota

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
245.	Kab Padang Pariaman
246.	Kab Pasaman
247.	Kab Pasaman Barat
248.	Kab Pesisir Selatan
249.	Kab Sijunjung
250.	Kab Solok
251.	Kab Solok Selatan
252.	Kab Tanah Datar
253.	Kab Bengkalis
254.	Kab Indragiri Hilir
255.	Kab Indragiri Hulu
256.	Kab Kampar
257.	Kab Kepulauan Meranti
258.	Kab Kuantan Singingi
259.	Kab Pelalawan
260.	Kab Rokan Hilir
261.	Kab Rokan Hulu
262.	Kab Siak
263.	Kab Batang Hari
264.	Kab Bungo
265.	Kab Kerinci
266.	Kab Merangin
267.	Kab Muaro Jambi
268.	Kab Sarolangun
269.	Kab Tanjung Jabung Barat
270.	Kab Tanjung Jabung Timur
271.	Kab Tebo
272.	Kab Banyuasin
273.	Kab Empat Lawang
274.	Kab Lahat
275.	Kab Muara Enim
276.	Kab Musi Banyuasin
277.	Kab Musi Rawas
278.	Kab Musi Rawas Utara
279.	Kab Ogan Ilir
280.	Kab Ogan Komering Ilir
281.	Kab Ogan Komering Ulu

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
282.	Kab Ogan Komering Ulu Selatan
283.	Kab Ogan Komering Ulu Timur
284.	Kab Penukal Abab Lematang Ilir
285.	Kab Bengkulu Tengah
286.	Kab Bengkulu Utara
287.	Kab Kaur
288.	Kab Kepahiang
289.	Kab Lebong
290.	Kab Mukomuko
291.	Kab Rejang Lebong
292.	Kab Lampung Barat
293.	Kab Lampung Selatan
294.	Kab Lampung Tengah
295.	Kab Lampung Timur
296.	Kab Pesawaran
297.	Kab Pesisir Barat
298.	Kab Pringsewu
299.	Kab Tanggamus
300.	Kab Tulang Bawang
301.	Kab Tulang Bawang Barat
302.	Kab Way Kanan
303.	Kab Bangka
304.	Kab Bangka Barat
305.	Kab Bangka Selatan
306.	Kab Bangka Tengah
307.	Kab Belitung Timur
308.	Kab Bintan
309.	Kab Karimun
310.	Kab Kepulauan Anambas
311.	Kab Lingga
312.	Kab Natuna
313.	Kab Bandung
314.	Kab Bandung Barat
315.	Kab Bekasi
316.	Kab Bogor
317.	Kab Ciamis
318.	Kab Cianjur

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
319.	Kab Cirebon
320.	Kab Garut
321.	Kab Indramayu
322.	Kab Karawang
323.	Kab Kuningan
324.	Kab Majalengka
325.	Kab Pangandaran
326.	Kab Purwakarta
327.	Kab Subang
328.	Kab Sukabumi
329.	Kab Sumedang
330.	Kab Tasikmalaya
331.	Kab Banjarnegara
332.	Kab Banyumas
333.	Kab Batang
334.	Kab Blora
335.	Kab Boyolali
336.	Kab Brebes
337.	Kab Cilacap
338.	Kab Demak
339.	Kab Grobogan
340.	Kab Jepara
341.	Kab Karanganyar
342.	Kab Kebumen
343.	Kab Kendal
344.	Kab Klaten
345.	Kab Kudus
346.	Kab Magelang
347.	Kab Pati
348.	Kab Pekalongan
349.	Kab Pemasang
350.	Kab Purbalingga
351.	Kab Purworejo
352.	Kab Rembang
353.	Kab Semarang
354.	Kab Sragen
355.	Kab Sukoharjo

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
356.	Kab Tegal
357.	Kab Temanggung
358.	Kab Wonogiri
359.	Kab Wonosobo
360.	Kab Bantul
361.	Kab Gunung Kidul
362.	Kab Kulon Progo
363.	Kab Sleman
364.	Kab Bangkalan
365.	Kab Banyuwangi
366.	Kab Blitar
367.	Kab Bojonegoro
368.	Kab Bondowoso
369.	Kab Gresik
370.	Kab Jombang
371.	Kab Kediri
372.	Kab Lamongan
373.	Kab Lumajang
374.	Kab Madiun
375.	Kab Magetan
376.	Kab Malang
377.	Kab Mojokerto
378.	Kab Nganjuk
379.	Kab Ngawi
380.	Kab Pacitan
381.	Kab Pamekasan
382.	Kab Pasuruan
383.	Kab Ponorogo
384.	Kab Probolinggo
385.	Kab Sampang
386.	Kab Sidoarjo
387.	Kab Situbondo
388.	Kab Sumenep
389.	Kab Trenggalek
390.	Kab Tuban
391.	Kab Tulungagung
392.	Kab Lebak

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
393.	Kab Pandeglang
394.	Kab Serang
395.	Kab Tangerang
396.	Kab Badung
397.	Kab Bangli
398.	Kab Buleleng
399.	Kab Gianyar
400.	Kab Jembrana
401.	Kab Karangasem
402.	Kab Klungkung
403.	Kab Tabanan
404.	Kab Bima
405.	Kab Dompu
406.	Kab Lombok Barat
407.	Kab Lombok Tengah
408.	Kab Lombok Timur
409.	Kab Lombok Utara
410.	Kab Sumbawa
411.	Kab Sumbawa Barat
412.	Kab Belu
413.	Kab Malaka
414.	Kab Manggarai
415.	Kab Manggarai Barat
416.	Kab Manggarai Timur
417.	Kab Nagekeo
418.	Kab Ngada
419.	Kab Sikka
420.	Kab Sumba Timur
421.	Kab Timor Tengah Selatan
422.	Kab Kapuas Hulu
423.	Kab Ketapang
424.	Kab Kubu Raya
425.	Kab Landak
426.	Kab Melawi
427.	Kab Mempawah
428.	Kab Sambas
429.	Kab Sanggau

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
430.	Kab Sekadau
431.	Kab Sintang
432.	Kab Barito Selatan
433.	Kab Barito Timur
434.	Kab Barito Utara
435.	Kab Gunung Mas
436.	Kab Kapuas
437.	Kab Katingan
438.	Kab Kotawaringin Barat
439.	Kab Kotawaringin Timur
440.	Kab Lamandau
441.	Kab Murung Raya
442.	Kab Pulang Pisau
443.	Kab Seruyan
444.	Kab Sukamara
445.	Kab Balangan
446.	Kab Banjar
447.	Kab Barito Kuala
448.	Kab Hulu Sungai Selatan
449.	Kab Hulu Sungai Tengah
450.	Kab Hulu Sungai Utara
451.	Kab Kotabaru
452.	Kab Tabalong
453.	Kab Tanah Bumbu
454.	Kab Tanah Laut
455.	Kab Tapin
456.	Kab Berau
457.	Kab Kutai Barat
458.	Kab Kutai Kartanegara
459.	Kab Kutai Timur
460.	Kab Mahakam Ulu
461.	Kab Paser
462.	Kab Penajam Paser Utara
463.	Kab Bulungan
464.	Kab Malinau
465.	Kab Nunukan
466.	Kab Tana Tidung

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
467.	Kab Bolaang Mongondow Selatan
468.	Kab Bolaang Mongondow Timur
469.	Kab Bolaang Mongondow Utara
470.	Kab Kepulauan Sangihe
471.	Kab Kep. Siau Tagulandang Biaro
472.	Kab Kepulauan Talaud
473.	Kab Minahasa
474.	Kab Minahasa Selatan
475.	Kab Minahasa Tenggara
476.	Kab Minahasa Utara
477.	Kab Banggai
478.	Kab Banggai Kepulauan
479.	Kab Banggai Laut
480.	Kab Buol
481.	Kab Donggala
482.	Kab Morowali
483.	Kab Morowali Utara
484.	Kab Parigi Moutong
485.	Kab Poso
486.	Kab Sigi
487.	Kab Tojo Una Una
488.	Kab Tolitoli
489.	Kab Bantaeng
490.	Kab Barru
491.	Kab Bone
492.	Kab Bulukumba
493.	Kab Enrekang
494.	Kab Gowa
495.	Kab Kep. Selayar
496.	Kab Luwu
497.	Kab Luwu Timur
498.	Kab Luwu Utara
499.	Kab Maros
500.	Kab Pangkajene dan Kepulauan
501.	Kab Pinrang
502.	Kab Sidenreng Rappang
503.	Kab Sinjai

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
504.	Kab Soppeng
505.	Kab Toraja Utara
506.	Kab Wajo
507.	Kab Bombana
508.	Kab Buton
509.	Kab Buton Utara
510.	Kab Buton Selatan
511.	Kab Buton Tengah
512.	Kab Kolaka
513.	Kab Kolaka Timur
514.	Kab Kolaka Utara
515.	Kab Konawe
516.	Kab Konawe Utara
517.	Kab Muna
518.	Kab Muna Barat
519.	Kab Wakatobi
520.	Kab Boalemo
521.	Kab Bone Bolango
522.	Kab Gorontalo
523.	Kab Gorontalo Utara
524.	Kab Pohuwato
525.	Kab Majene
526.	Kab Mamasa
527.	Kab Mamuju
528.	Kab Pasangkayu
529.	Kab Mamuju Tengah
530.	Kab Polewali Mandar
531.	Kab Buru
532.	Kab Maluku Barat Daya
533.	Kab Maluku Tengah
534.	Kab Maluku Tenggara
535.	Kab Kepulauan Tanimbar
536.	Kab Halmahera Barat
537.	Kab Halmahera Selatan
538.	Kab Halmahera Tengah
539.	Kab Halmahera Timur
540.	Kab Halmahera Utara

DAFTAR PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN WTP TAHUN 2019

No.	Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah
541.	Kab Kepulauan Sula
542.	Kab Pulau Morotai
543.	Kab Asmat
544.	Kab Jayapura
545.	Kab Jayawijaya
546.	Kab Keerom
547.	Kab Kepulauan Yapen
548.	Kab Lanny Jaya
549.	Kab Merauke
550.	Kab Mimika
551.	Kab Nabire
552.	Kab Paniai
553.	Kab Pegunungan Bintang
554.	Kab Puncak
555.	Kab Puncak Jaya
556.	Kab Supiori
557.	Kab Yahukimo
558.	Kab Yalimo
559.	Kab Fakfak
560.	Kab Kaimana
561.	Kab Manokwari
562.	Kab Manokwari Selatan
563.	Kab Maybrat
564.	Kab Raja Ampat
565.	Kab Sorong
566.	Kab Sorong Selatan
567.	Kab Tambrauw
568.	Kab Teluk Bintuni
569.	Kab Teluk Wondama
570.	Kab Konawe Kepulauan

PEMENANG KATEGORI UTILISASI BMN

Kelompok 1

No	Kementerian/Lembaga
1	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
2	Sekretariat Kabinet
3	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Kelompok 2

1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum
3	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Kelompok 3

1	Kementerian Keuangan
2	Kementerian Pertahanan
3	Kementerian Perhubungan

PEMENANG KATEGORI KUALITAS PELAPORAN BMN

Kelompok 1

No	Kementerian/Lembaga
1	Dewan Perwakilan Rakyat RI
2	Sekretariat Kabinet
3	Badan Standardisasi Nasional

Kelompok 2

1	Kementerian Komunikasi dan Informatika
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3	Badan Pemeriksa Keuangan RI

Kelompok 3

1	Mahkamah Agung RI
2	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

PEMENANG KATEGORI SERTIPIKASI BMN

Kelompok 1

No	Kementerian/Lembaga
1	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
2	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
3	Badan Intelijen Negara

Kelompok 2

1	Kementerian Komunikasi dan Informatika
2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Kelompok 3

1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Kepolisian Negara Republik Indonesia
3	Kementerian Agama

**PEMENANG KATEGORI PENINGKATAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN
(CONTINUOUS IMPROVEMENT)**

No	Kementerian/Lembaga
1	Mahkamah Agung RI
2	Kementerian Kesehatan
3	Kementerian Keuangan

**PENERIMA PENGHARGAAN KATEGORI KERJASAMA TATA KELOLA ANTAR
KEMENTERIAN/LEMBAGA (PEER COLLABORATION)**

No	Kementerian/Lembaga
1	Kementerian ATR/BPN
2	Kementerian PUPR
3	BPK RI